Realisasi Penerimaan PPN yang dipengaruhi oleh Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Restitusi PPN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

Pembimbing:
Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si., Ak., CA

Oleh:
Gita Novianti
21114159
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: gitanovianty96@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at Tax Office Pratama Cibeunying Bandung. VAT periodic tax return and VAT tax refund is one of the factors affecting tax revenue. A phenomenon that occurs in the study of VAT refunds taxation. If the nominal amount of VAT tax refund increases, the VAT tax revenue decreases. The purpose of this study is to examine and analyze how big the influence of the notice of the period to the receipt of value added tax at KPP Pratama Cibeunying Bandung. And examine and analyze how much influence tax restitution on value added tax revenue In KPP Pratama Cibeunying Bandung.

In this research use descriptive and verification method with quantitative approach. Statistical test used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, determinant coefficient analysis.

The result of this research of VAT periodic tax return has a significant effect on Value Added Tax at KPP Pratama Cibeunying. And VAT Restitution has a significant effect on Value Added Tax on KPP Pratama Cibeunying.

Keywords: Periodicc Tax Return, VAT Tax Refund, VAT Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Nur Hidayat, 2013:183). Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin besar, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri salah satu sumber dana yang diperoleh negara berasal dari penerimaan pajak (Waluyo, 2011:2).

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007:325). Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang sudah berlaku di Indonesia sejak Tahun 1951. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Pajak Penjualan berlaku di Indonesia sejak 1 Oktober 1951 (Untung Sukardji, 2014). Undang-undang ini dinamakan UU PPn 1951, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun1953, Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (Untung Sukardi, 2014).

Adapun fenomena yang terjadi pada salah satu KPP Pratama Cibeunying Bandung yaitu, pada praktiknya SPT Masa PPN yang dilaporkan cenderung meningkat pada tahun cenderung menurun dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 akan tetapi penerimaan nya mengalami Kenaikan (Affi, 2018). Pengembalian kelebihan membayar pajak (restitusi) cenderung meningkat dari

tahun 2013, 2015, dan 2017 yang berdampak pada turunnya realisasi PPN di KPP Pratama Cibeunying (Affi, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerimaan PPN yang dipengaruhi oleh Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Restitusi PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung)".**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar Belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar dan bagaimana pengaruh Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying
2. Seberapa besar dan bagaimana pengaruh Nominal Restitusi PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar dan bagaimana pengaruh Nominal Surat Pemberitahuan Masa terhadap Realisasi Peneriman Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Cibeunying Bandung
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar dan bagaimana pengaruh Nominal Restitusi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Cibeunying Bandung.

1.4 Kegunaaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat ditujukan:

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung dapat memberikan informasi mengenai Realisasi Penerimaan PPN dipengaruhi oleh Nominal Surat Pemberitahuan Masa dan Nominal Restitusi Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis adalah untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat membantu:

1. Bagi Peneliti
   Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran ilmu tentang bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Nominal Surat Pemberitahuan Masa dan Nominal Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
2. Bagi Prodi Akuntansi
   Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa prodi akuntansi dalam bidang perpajakan terkait Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Nominal Surat Pemberitahuan Masa dan Nominal Restitusi Pajak

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan Masa PPN

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) "Surat pemberitahuan (SPT) merupakan "dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut "Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan

atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

2.1.2 Restitusi PPN

Menurut Untung Sukardji (2015:215) "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan yang menimbulkan kelebihan bayar".

Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) "Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila dalam suatu masa, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan".

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018:321) "Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebagai pengganti Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak".

Menurut Untung Sukardji (2015:11) "Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa"

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pencairan Atas Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis

"Konsep lain yang menghubungkan SPT Masa dan Penerimaan bahwa Setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara"

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slammer Irianto (2011:202) menyatakan bahwa:

"Konsep dan teori yang dapat menghubungkan SPT Masa dan penerimaan PPN SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan".

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Resmi (2014:214) "Restitusi pajak pertambahan nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi kedalam penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada"

Menurut Untung Sukardji (2015:59) "bahwa semakin besar restitusi, maka semakin mengurangi penerimaan pajak".

Dari beberapa pernyataan diatas dapat digambarkan dalam bentuk paradigma penelitian atas Realisasi Penerimaan PPN yang dipengaruhi oleh Nominal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Restitusi PPN adalah pada gambar 2.1.

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H_1: Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2: Nominal Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh

terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Definisi Metode Penelitian menurut Sofar Silaen (2018:8) yaitu : "Penjabaran, penguraian, atau pengkajian mengenai metode-metode ilmiah, yang mencakup mulai dari perencanaan, proposal, atau desain penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan analisis hasil penelitian, sampai penulisan laporan penelitian". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menguji dan menganalisis lebih jauh variabel Realisasi Penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) yang dipengaruhi oleh variabel Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1) dan Nominal Restitusi PPN (X_2) dan menguji suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasional Variabel

"Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor" (Umi Narimawati (2010:31). Pada tabel 3.1 terdapat lebih jelas mengenai variabel-variabel yang di teliti.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying yang berupa data jumlah nominal penerimaan pajak pertambahan nilai dan data jumlah nominal pelaporan SPT masa PPN yang dilakukan serta jumlah nominal restitusi pajak.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:215), "pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini diambil dari periode 2013-2017 yaitu sebanyak 60 laporan bulanan dari data perbulan (12 bulan) dari Januari sampai dengan Desember dalam 5 tahun berturut-turut mengenai jumlah nominal surat pemberitahuan masa, jumlah nominal restitusi pajak dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Cibeunying.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:215) sampel yaitu "Bagian dari populasi". Pengambilan sampel di KPP Pratama Cibeunying dengan pertimbangan bahwa jumlah nominal SPT Masa PPN, jumlah nominal restitusi PPN yang berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian adalah periode 2013-2017. Jumlah sampel yaitu 60 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dari Januari sampai dengan Desember dalam 5 tahun berturut-turut mengenai jumlah nominal surat pemberitahuan masa, jumlah nominal restitusi pajak pertambahan nilai dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Cibeunying.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying yang berlokasi di Jl. Purnawarman No.21, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

Peneliti menggunakan Alat pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

untuk memperoleh hasil regresi yang baik, Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan uji asumsi klasik. Terdapat beberapa uji asumsi yang harus dipenuhi yaitu Uji Asumsi Normalitas, Uji Asumsi Multikolinieritas, Uji Asumsi Heteroskedastisitas, Uji Asumsi Autokorelasi.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Pengujian Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) "Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

3.6.2 Analisis Pengujian Verifikatif

Analisis verifikatif adalah "pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima. Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan analisis jalur, data tersebut harus dilakukan pengujian verifikatif dengan uji normalitas lebih dahulu. Uji verifikatif dilakukan dengan menggunakan hasil pengujian statistik dari analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi" (Sugiyono, 2013:6).

1) Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda tersebut yaitu sebagai berikut:

"Arti koefisien β menunjukan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya" (Sugiyono, 2013:261).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

2) Analis Kolerasi

"Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)". (Sugiyono, 2013:250)

Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien	**Tingkat Hubungan**
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

3) Koefisien Determinasi

"Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase" (Imam Ghozali (2016:98). Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100\%}$$

4) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

"Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: nominal penerimaan pajak pertambahan nilai dan rstitusi PPN terhadap satu variabel dependen, yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya" (Sugiyono, 2013:230).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Jumlah Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2013-2017

Jumlah nominal surat pemberitahuan masa PPN tertinggi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2016 bulan Oktober. Sedangkan jumlah nominal terendah surat pemberitahuan masa PPN dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2015 bulan Januari.

4.1.1.2 Jumlah Nominal Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2013-2017

Jumlah nominal restitusi PPN tertinggi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2015 bulan Mei. Sedangkan jumlah nominal terendah restitusi PPN dari tahun 2013-2017 adalah pada tahun 2013 bulan Juli.

4.1.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2013-2017

Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2015 bulan Desember. Sedangkan nominal terendah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2013-2017 adalah pada tahun 2013 bulan Januari.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
   Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak pada Pengujian normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas yang di lihat dari. nilai Asymp Sig. > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian normalitas terlihat pada tabel 4.7 bahwa nilai probabilitas (Sig) dari masing-masing variabel >0.05 yang menunjukan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal sehingga disimpulkan bahwa data memenuhi uji normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
   Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tabel *tolerance value* dan *Variance Inflantion Factor* (VIF) dengan kriteria pengujian jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Dilihat pada Tabel 4.8 nilai tolerance kedua variabel sebesar 2,252 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,444 = 44,4% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedasitas
   Sesuai pada Gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh membentuk *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang serta menyebar diatas dan dibawah titik origin (angka 0) pada sumbu Y sehingga model regresi yang akan

dibentuk tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Sesuai pada Tabel 4.9, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* yang diperoleh sebesar 1,916. Karena nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,916 dimana nilai Durbin-Watson berada di antara -1 sampai 3, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Sesuai dengan Uji Asumsi Klasik diatas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik sehingga data dapat dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

$Y= 5.065.763.423,59 + 1,473 (X_1) - 0,942 (X_2)$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 5.065.763.423,59; artinya jika Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Restitusi PPN nilainya adalah 0, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai nilainya adalah 5.065.763.423,59..
b. Koefisien regresi variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1) sebesar 1,473; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Surat Pemberitahuan Masa PPN mengalami kenaikan 1%, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,473. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, semakin besar Surat Pemberitahuan Masa PPN maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan semakin besar.
c. Koefisien regresi variabel Restitusi PPN (X_2) sebesar -0,942; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Restitusi PPN mengalami kenaikan 1%, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,942. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Restitusi PPN dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, semakin tinggi Restitusi PPN maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai semakin tinggi.

4.1.3 Analisis Korelasi

Sesuai pada tabel 4.11, hubungan antara Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika Nominal Restitusi PPN tidak berubah adalah sebesar 0,562, artinya Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN memiliki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN maka hal tersebut akan menaikan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitupun sebaliknya.

Dapat dilihat pada tabel 4.12, hubungan antara Restitusi PPN dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak berubah adalah sebesar -0,567, artinya Restitusi PPN memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negatif artinya, setiap kenaikan

Restitusi PPN maka hal tersebut akan menurunkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitupun sebaliknya.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

Pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai = $(0,562)^2$ x 100% = 31,5% sesuai dengan tabel 4.11.
b. Pengaruh Nominal Restitusi PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai = $(0,567)^2$ x 100% = 32,14% sesuai dengan tabel 4.12.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai $-t_{hitung}$ untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1) sebesar 2,687. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 60-2-1= 57, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,687 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN sebesar 0,009, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,9% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cibeunying, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_2 tampak pada gambar 4.6.

Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai $-t_{hitung}$ untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1) sebesar -2,729. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 60-2-1= 57, maka diperoleh nilai $-t_{tabel}$ sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-2,729 < -2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Surat Pemberitahuan Masa PPN sebesar 0,008, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,8% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cibeunying., nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_2 sesuai pada gambar 4.7.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Nominal Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:57) “mengemukakan bahwa Setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan PPN”.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu Jumlah nominal surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak cenderung menurun dari tahun 2013, 2014, 2016 pada KPP Pratama Cibeunying. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih

dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan pajak PPN yang telah dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2014) dan Apik Aji Masithoh (2011), "menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

4.2.2 Pengaruh Nominal Restitusi PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negatif artinya setiap kenaikan jumlah Restitusi PPN maka akan mengurangi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Menurut Siti Resmi (2014:214) "Restitusi pajak pertambahan nilai dapat dikatakan sangat mempengaruhi kedalam penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada". "Dimana semakin besar restitusi, maka semakin mengurangi penerimaan pajak" (Untung Sukardji, 2015:59).

Kemudian besar presentase pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 32,14%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 67,86% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu masalah yang tejadi yaitu Pengembalian kelebihan membayar pajak (restitusi) cenderung meningkat dari tahun 2013, 2015 dan 2017 yang berdampak pada turunnya realisasi PPN di KPP Pratama Cibeunying, sehingga menyebabkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Cibeunying belum mencapai target. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Restitusi PPN, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan Wandha, David, Harijanto (2014) "yang menyatakan bahwa Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagian berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan kategori korelasi sedang dimana semakin tinggi jumlah nominal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitu pun jika sebaliknya. Data yang terjadi dilapangan menunjukkan kurangnya penyuluhan kepada wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN yang menyebabkan penerimaan mengalami penurunan. Fenomena yang menjadi masalah mengenai Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Jumlah nominal surat

pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak cenderung menurun dari tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017 pada KPP Pratama Cibeunying.

2. Restitusi PPN sebagian berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan kategori korelasi sedang dimana jika semakin besar Restitusi PPN, maka akan mengurangi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan begitu pun jika sebaliknya. Fenomena terkait Restitusi PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengembalian kelebihan membayar pajak (restitusi) cenderung meningkat dari tahun 2015-2017 yang berdampak pada turunnya realisasi PPN di KPP Pratama Cibeunying, sehingga menyebabkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Cibeunying belum mencapai target.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying diharapkan untuk mengkaji lebih dalam bentuk penyuluhan perpajakan terpadu secara intensif untuk meningkatkan agar pemahaman wajib pajak tentang pentingnya melaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar dan menyadari agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

5.2.2 Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Nurrokhman. 2014. *Analisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kpp pratama semarang gayamsari.*

Djuanda & Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Farida Khairani Lubis. 2016. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*, Jurnal Wahana Inovasi, ISSN : 2089-8592, VOLUME 5 No.2, JULI-DES 2016

Haula Rosdiana dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan.Edisi Terbaru.Yogjakarta*: CV Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai edisi revisi 2015*. Jakarta : Rajagrafindo Pers.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Supramono, Theresia Woro Damayanti.2015. *Mekanisme dan Perhitungan Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.

Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* Bogor :In Media

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Ganesis. Bekasi.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Wandha Marina Supir. 2014. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.* Ejournal. http://id.portalgaruda.org/. Diakses: 18 Januari 2016.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1)	Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017, 273).	Jumlah Nominal pelaporan SPT Masa (Erly Suandi, 2011:155)	Rasio
Restitusi PPN (X_2)	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Pajak Masukan (PM) yang dibayar dalam suatu masa lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK) yang dipungut (Untung Sukardji, 2015:215).	Jumlah Nominal selisih pajak masukan yang dibayar dengan pajak keluaran (Untung Sukardji, 2015:215)	Rasio
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2011:9).	Jumlah Nominal realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010).	Rasio

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000

	Std. Deviation	.26840876
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.139
	Negative	-.116
Test Statistic		.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095[c]

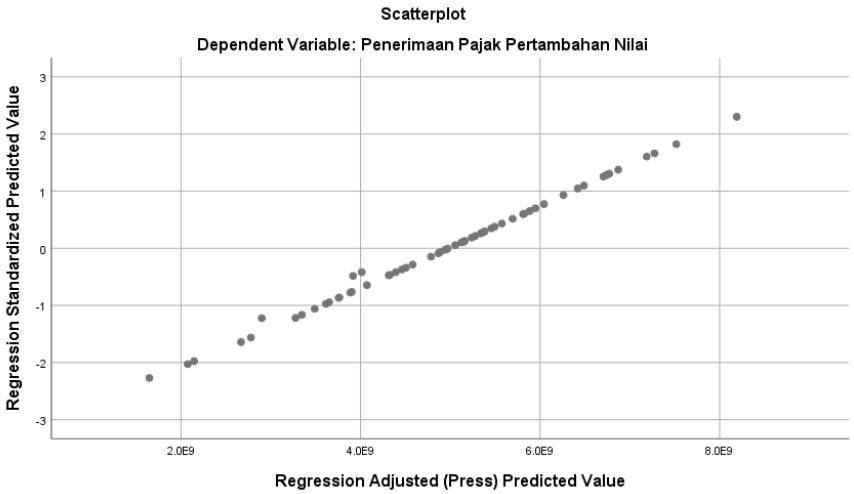
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Surat Pemberitahuan Masa PPN	.444	2.252
	Restitusi PPN	.444	2.252

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi

Model Summary[b]

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.709[a]	.503	.485	1427249168.11351	1.916

a. Predictors: (Constant), Restitusi PPN , Surat Pemberitahuan Masa PPN
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4.10
Hasil Korelasi Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Penagihan Pajak	Penerimaan PPh Badan
Surat Pemberitahuan Masa PPN	Pearson Correlation	1	.438**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	.438**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

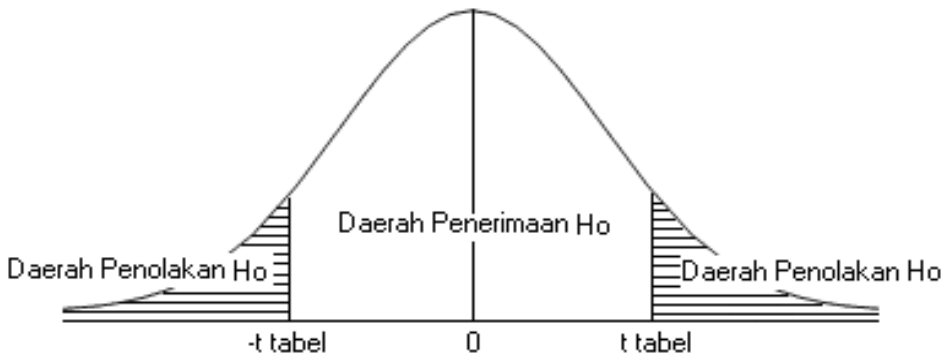
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.11
Hasil Korelasi Pearson Restitusi PPN dengan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Correlations

		Restitusi PPN	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Restitusi PPN	Pearson Correlation	1	-.567**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	-.567**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

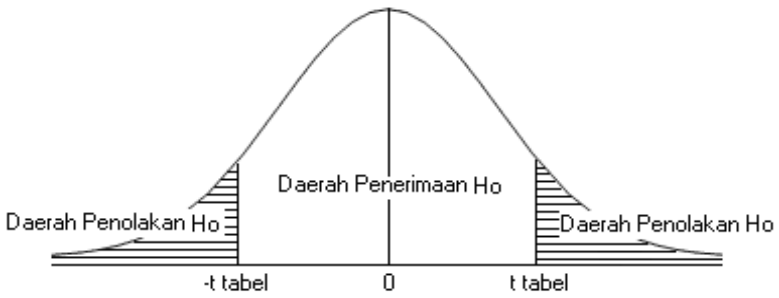
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



t_{tabel} = -2,002 t_{tabel} = 2,002 $-t_{hitung}$ = 2,687

Gambar 4.6

Kurva Hipotesis Parsial Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



t_{hitung} = -2,729 t_{tabel} = -2,002 t_{tabel} = 2,002

Gambar 4.7
Kurva Hipotesis Parsial Restitusi PPN dengan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai